

INSPIRASI 12 PRAKTIK BAIK

Inovasi dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Indonesia



Desa Inspirasi

KOMPAK

Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia

INSPIRASI 12 PRAKTIK BAIK

Inovasi dan Kolaborasi untuk Kesejahteraan Indonesia



Daftar Isi

2

JARING PEKAT

Penjaringan kepemilikan akta kelahiran melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan masyarakat

4

OJEK KEPENDUDUKAN

Layanan serupa ojek, khusus untuk proses pengurusan administrasi kependudukan

6

PETUGAS REGISTRASI GAMPONG

Layanan jemput bola untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan

8

KADER KAMPUNG

Memperkuat layanan dasar melalui data kampung berbasis masyarakat

10

UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA (UMD)

Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) yang mendukung pembangunan desa

12

MONITORING KOLABORATIF DESA

Mendorong akuntabilitas sosial dalam layanan kesehatan dan pendidikan di desa



14 **KEPERANTARAAN PASAR**
Mengembangkan usaha secara lebih berkeadilan dan berkesinambungan

16 **SEPAKAT**
Aplikasi yang membantu menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran

18 **KELAS PERAHU**
Menekan angka putus sekolah bagi anak-anak nelayan yang ikut melaut

20 **GETAR DESA**
Inovasi gerakan pendidikan kesetaraan berbasis desa

22 **PUSKESMAS PENGGERAK**
Mendorong Puskesmas melakukan perubahan untuk meningkatkan layanan

24 **AKREDITASI PUSKESMAS**
Dukungan penguatan kapasitas Puskesmas untuk mendapatkan akreditasi

JARING PEKAT

Model Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Lombok Utara, NTB

Jaring Pekat menggerakkan jalur-jalur yang paling dekat dengan target sasaran untuk memastikan seluruh warga di Kabupaten Lombok Utara bisa mendapatkan administrasi kependudukan sebagai hak identitas hukum.

PROSES JARING PEKAT



JARING PEKAT MEMUNCULKAN INOVASI

JEMPOLAN (Jemput Berkas Proses dan Hasil Diantarkan)

PENALTI (Pelayanan Akta Kelahiran 30 Menit Jadi)

KLU BERDOA (Pelayanan Berkas Melalui Online dan WhatsApp) dengan *e-mail* dukcapilombokutara@yahoo.co.id dan WhatsApp: 0818 05293255

DAMPAK JARING PEKAT



Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran menjadi 88,47 persen, lebih tinggi dari target nasional tahun 2018 yaitu 85 persen (data per Mei 2018).



Bertambahnya komitmen dan kepedulian para pemangku kepentingan terhadap pentingnya pengurusan dan kepemilikan akta kelahiran bagi warga.



Membaiknya kualitas pelayanan identitas hukum, khususnya akta kelahiran.

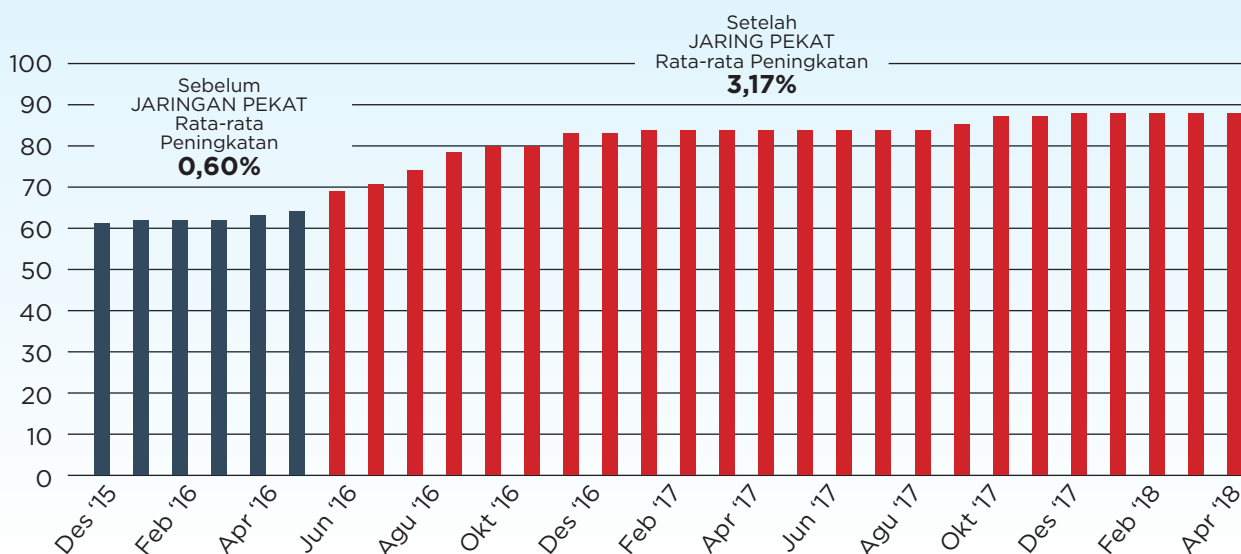


Naiknya anggaran Disdukcapil untuk inovasi Jaring Pekat dan pengembangannya.



Adanya alokasi APBDes 2018 di semua desa di Kabupaten Lombok Utara untuk pembiayaan isbat nikah.

DATA CAPAIAN AKTA KELAHIRAN



OJEK KEPENDUDUKAN

Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah

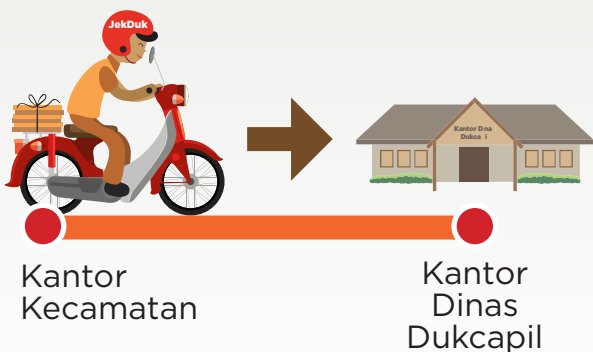
Pelayanan administrasi kependudukan dengan mengambil dan mengantarkan formulir ke kabupaten untuk diproses lebih lanjut di Kantor Dinas Dukcapil.

LATAR BELAKANG

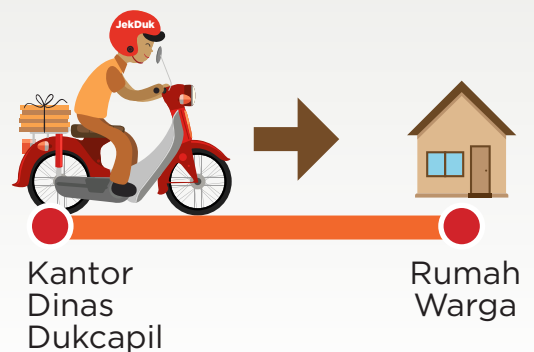
Kecamatan Petungkriyono memiliki geografis pegunungan dengan jarak tempuh dari desa ke kecamatan dan kabupaten yang cukup jauh. Hal ini menyebabkan proses pengurusan administrasi kependudukan memakan waktu yang lama dan biaya transportasi tinggi. Masalah inilah yang akhirnya memunculkan inovasi Ojek Kependudukan (JekDuk), di mana petugas kecamatan berperan seperti tukang ojek yang mengantar dan mengambil dokumen.



SATGAS OPERASIONAL



SATGAS KEWILAYAHAN





DAMPAK INOVASI

Mempercepat pengurusan kartu keluarga dari 2-4 minggu menjadi hanya **2-4 hari** secara gratis.

Mampu menyelesaikan 50 dokumen kependudukan dalam 2 minggu.

Penandatanganan MoU Kecamatan Petungkriyono dengan Dinas Dukcapil Pekalongan saat peluncuran Inovasi JekDuk terkait percepatan layanan.



CAPAIAN

611

dokumen kependudukan telah diperbarui dan didaftarkan melalui pelayanan JekDuk di Kecamatan Petungkriyono (sampai Oktober 2017)

1.523

dokumen kependudukan sudah terlayani melalui JekDuk (sampai pertengahan 2018)

PETUGAS REGISTRASI GAMPONG

Mendekatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat di Aceh

Model layanan *door-to-door* yang difasilitasi oleh Petugas Registrasi Gampong/Kampung (PRG) untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan serta mengatasi kendala wilayah geografis yang jauh dan sulit.



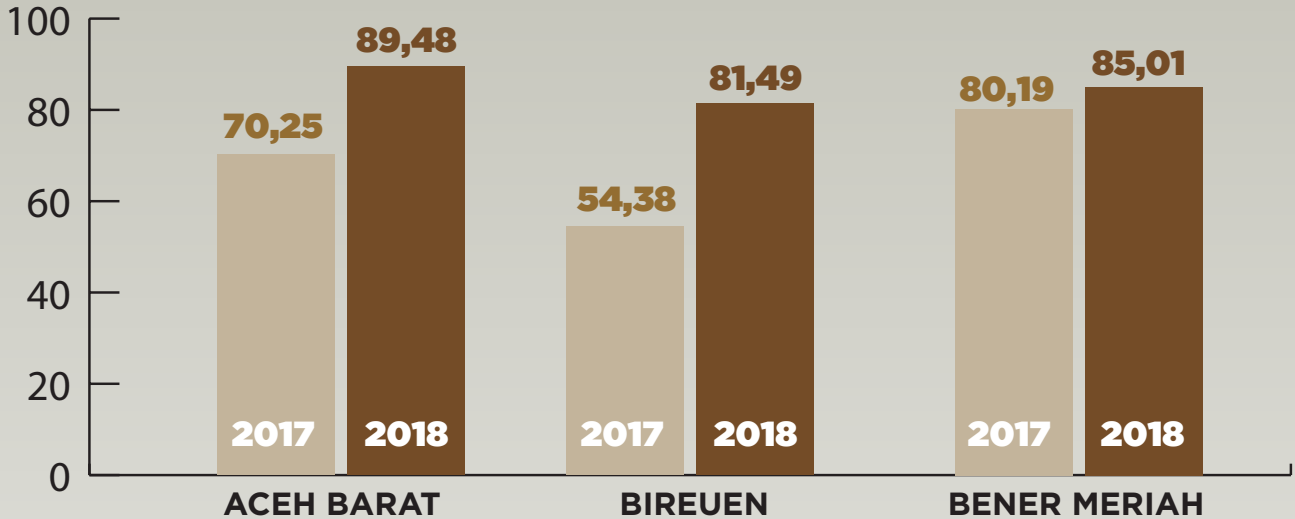
KEUNIKAN PROGRAM

PRG menjangkau daerah terpencil/kepulauan/akses sulit melalui pembentukan dan membangun model koordinasi lintas sektor dalam pemberian layanan administrasi kependudukan, terutama kelompok miskin dan rentan. Petugas akan membantu warga mengumpulkan persyaratan, menjemput, dan mengantarkan dokumen ke rumah warga yang memerlukan. Program ini diprioritaskan untuk pengurusan akta kelahiran dan akta kematian bagi kelompok paling rentan, yaitu warga miskin dan kelompok disabilitas.

DAMPAK

Adanya peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun di Kabupaten Aceh Barat, Bireuen, dan Bener Meriah pada 2017 dan 2018.

CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN



CAPAIAN

- Di Kabupaten Bireuen, telah terjadi peningkatan cakupan kepemilikan akta lahir anak usia 0-18 tahun sebesar 27,11 persen, dari sebelumnya 54,38% pada Januari 2018 menjadi 81,49%.
- Memberikan kemudahan bagi 2.714 orang warga (akta lahir yang telah diterbitkan melalui layanan PRG), termasuk warga miskin dan rentan (difabel).



KADER KAMPUNG

Membangun Papua dan Papua Barat Mulai dari Kampung

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas layanan dasar dan akses masyarakat di Papua dan Papua Barat terhadap pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, dan pencatatan sipil yang berkualitas.



KEUNIKAN

KOMPAK melalui kegiatan LANDASAN yang didesain untuk Papua dan Papua Barat secara khusus menargetkan penyelesaian masalah-masalah pelayanan dasar di masyarakat. Dimulai sejak awal 2017, LANDASAN saat ini dilaksanakan di 225 kampung yang tersebar di 6 kabupaten di Provinsi Papua dan 4 kabupaten di Provinsi Papua Barat. Dalam pelaksanaan kegiatannya, LANDASAN memanfaatkan pemuda-pemudi kampung sebagai kader pemberdayaan masyarakat untuk mengumpulkan serta mengelola data tersebut dengan Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) yang dibangun serta diterapkan di kampung-kampung secara bertahap.

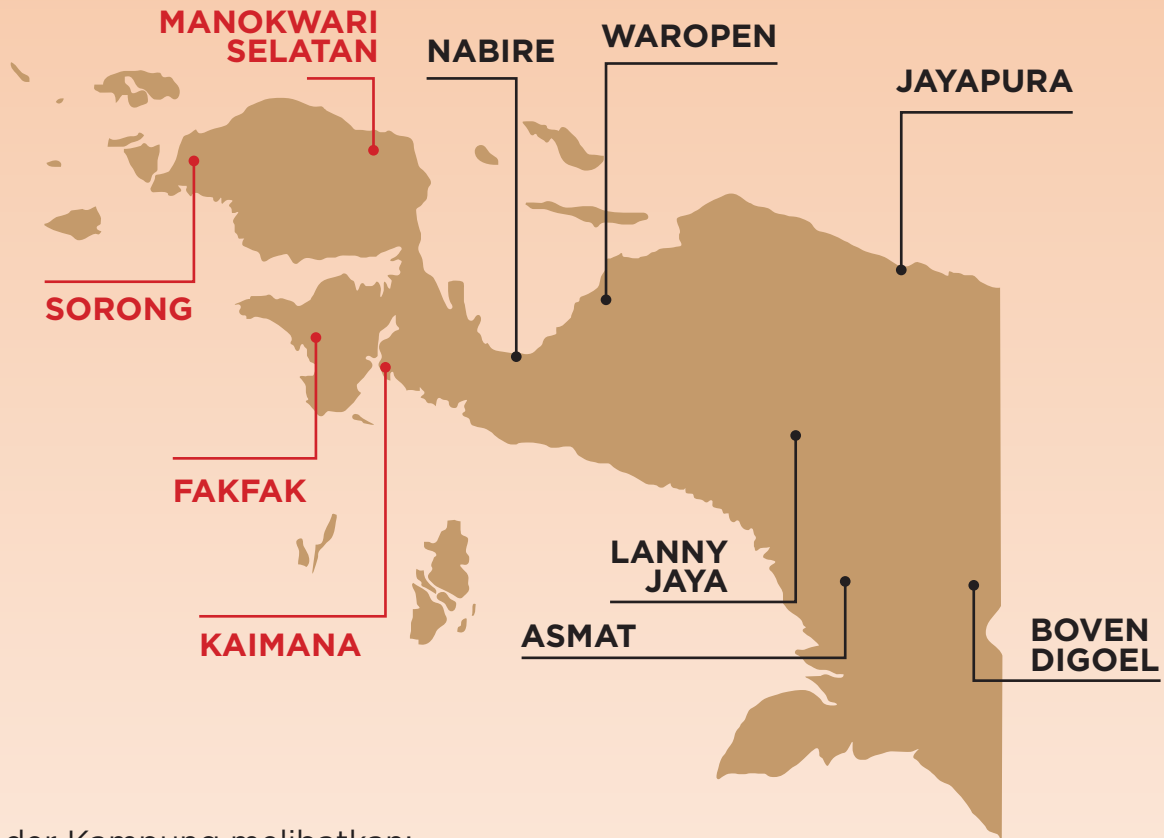




CAKUPAN

Program ini tersebar di 10 kabupaten:

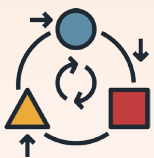
6 DI PAPUA | **4** DI PAPUA BARAT



Kader Kampung melibatkan:

225

KAMPUNG DI
PAPUA DAN
PAPUA BARAT



DAMPAK

- Kampung dan distrik memiliki data-data kependudukan, sosial, dan ekonomi masyarakat yang akurat.
- Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan dasar tersebut seperti di Distrik Sentani Timur yang menjadi prototipe dan pusat pembelajaran bagi kabupaten lain.
- Pembangunan melalui penguatan kader kampung telah terbukti berhasil dan berkelanjutan.
- Kader yang terlatih melalui program ini sebanyak 425 orang, 112 di antaranya adalah perempuan.

UNIVERSITAS MEMBANGUN DESA (UMD)

Membangun Aset yang Terabaikan (Program KKN) melalui Kolaborasi Inovatif

Program Universitas Membangun Desa (UMD) adalah model kolaborasi yang dikembangkan untuk memanfaatkan potensi program pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi seperti Kuliah Kerja Nyata, Praktik Kerja Lapangan, dan program sejenis dalam rangka optimalisasi pembangunan desa.



PROSES



1. Pembentukan Tim Pelaksana di Universitas



4. *Workshop* penyusunan program



7. Pembekalan kepada dosen supervisor dan mahasiswa



2. Menyusun panduan pelaksanaan KKN Tematik



5. Seleksi dosen pembimbing lapangan



8. Evaluasi dan monitoring



3. Survei dan FGD untuk penentuan tematik



6. Seleksi mahasiswa peserta KKN Tematik



9. *Peer-to-peer learning*

PELAKSANAAN PROGRAM

Program UMD berlangsung sejak Juni 2016 hingga Juni 2017. Empat universitas yaitu Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Jember, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Aceh, dan UIN Alauddin Makassar telah terpilih melalui kompetisi terbuka. Keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan masyarakat bukanlah sebuah hal baru. Namun bagaimana mengoptimalkan program KKN dan sejenisnya sehingga dapat memberikan hasil yang berkelanjutan menjadi tantangan yang ingin dijawab melalui model UMD ini. Salah satunya melalui model KKN Tematik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan strategis dalam upaya perbaikan penyediaan layanan dasar, pengembangan sistem informasi desa, serta membantu menciptakan peluang kerja di masyarakat.

REPLIKASI PROGRAM

Dengan dukungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, KOMPAK memfasilitasi forum *peer to peer learning* kepada kampus yang berminat mengadopsi model ini melalui kolaborasi dengan Kampus Mitra model UMD sebagai mentor dan fasilitator, termasuk menggandeng Kementerian Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama untuk memperluas cakupan model ini di ranah kampus Pendidikan Tinggi Islam. Model kolaborasi ini melibatkan Kampus Mitra, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat penerima manfaat dari implementasi model UMD.

CAPAIAN DAN DAMPAK

- Aplikasi SAID (Sistem Administrasi Info Desa) yang dikembangkan oleh UMD Universitas Jember telah mencakup 161 desa di Bondowoso dan 30 desa di Probolinggo dan memunculkan berbagai potensi ekonomi baru. Model UMD ini telah berkembang hingga ke 320 desa dengan berbagai isu.
- Di Kabupaten Aceh Barat, program UMD telah menciptakan kesempatan kerja kepada 122 perempuan melalui pemanfaatan limbah eceng gondok. Saat ini program tersebut telah berkelanjutan dengan dukungan dari pemerintah setempat dan pihak swasta (pemanfaatan dana CSR) serta tereplikasi ke daerah lain.
- Universitas Parahyangan mendorong penyusunan dan pemutakhiran data desa berbasis dokumen di 3 desa di Kecamatan Sukawening, inisiasi model UMD melalui IAPA, serta replikasi model UMD di Bali, Yogyakarta, dan Sumatera Utara.
- Guna mendukung keberlanjutan dari model kolaborasi UMD, saat ini Kementerian Desa PDTT bersama Kemenristekdikti dan Kemenag tengah merumuskan payung hukum berupa Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

MONITORING KOLABORATIF DESA

Mendorong Akuntabilitas Sosial dalam Layanan Kesehatan dan Pendidikan



Monitoring Kolaboratif Desa adalah salah satu instrumen akuntabilitas sosial untuk mendorong kepedulian warga terhadap pemenuhan hak-hak layanan dasar.

Program ini diujicobakan KOMPAK bersama dengan The Asia Foundation selaku mitra, sejak Februari 2017 sampai April 2018 di 30 desa, 12 kabupaten, dan 5 provinsi.

PROSES



Penguatan kapasitas pada kelompok-kelompok warga



Sosialisasi dan audiensi ke pemberi layanan



Pembekalan relawan untuk menjadi fasilitator



FGD kartu penilaian dan monitoring standar



Pleno hasil penilaian dan tindak lanjut



DAMPAK

- 67 unit layanan kesehatan dan pendidikan mengimplementasikan Monitoring Kolaboratif (36 Posyandu, 13 Puskesmas, 13 SMP, 3 Disdukcapil, 2 PAUD).
- Perbaikan layanan oleh pemberi layanan (Pustu dan Polindes difungsikan, Posyandu punya jadwal lebih teratur, penambahan bidan dan obat-obatan, penambahan jumlah toilet di sekolah, dll). Perbaikan layanan telah dianggarkan dalam APBDesa.



PERKEMBANGAN TERKINI

Instrumen ini terus diujicobakan di lokasi-lokasi lain, khususnya oleh para penggerak atau kader-kader masyarakat yang sudah berdaya. Di beberapa desa, anggaran desa untuk perbaikan layanan dasar semakin meningkat setiap tahun. Kasus-kasus perbaikan layanan makin banyak terdokumentasikan antara lain pembebasan biaya melahirkan di Kabupaten Lombok Timur, penyediaan mobil sekolah/ambulans di Kabupaten Bireuen, dan fasilitasi pendidikan untuk anak difabel di Kabupaten Pematang dan Kabupaten Bantaeng.

KEPERANTARAAN PASAR

Mendukung Upaya Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan Melalui Pendekatan Kolaborasi

Keperantaraan Pasar merupakan pendekatan kolaborasi peran para pihak sebagai upaya menciptakan dan mengembangkan usaha secara lebih berkeadilan dan berkesinambungan dalam konteks pengembangan ekonomi lokal dan percepatan penurunan angka kemiskinan.

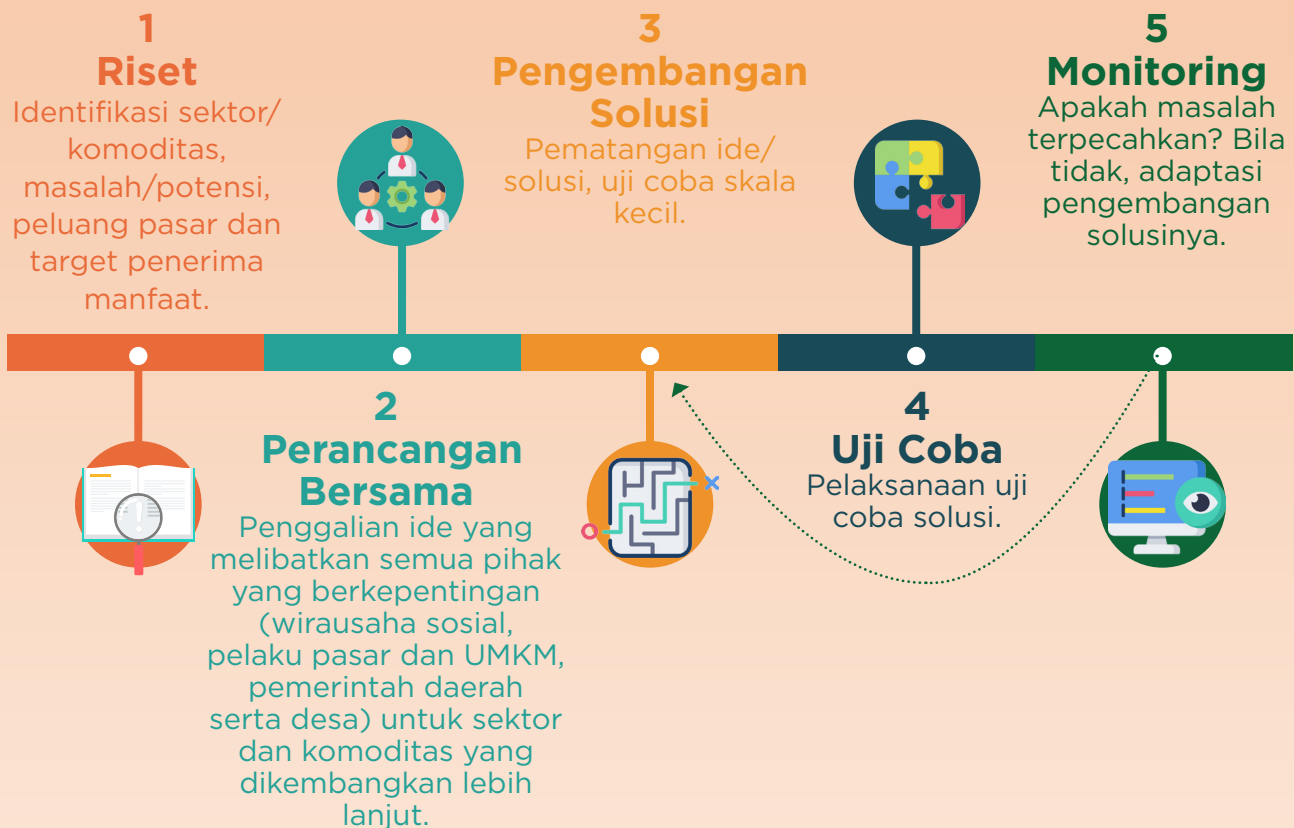


KEUNIKAN

- Pendekatan keperantaraan pasar dilaksanakan dengan mencoba ide/solusi secara iteratif untuk dilihat hasilnya dalam waktu yang relatif singkat.
- Melihat peluang pasar dari pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sesuai dengan tren kebutuhan saat ini.
- Menyesuaikan produk/jasa sesuai dengan konteks dan prioritas daerah (komoditas yang berpotensi meningkatkan pendapatan bagi masyarakat miskin, terutama kelompok perempuan, pemuda, dan difabel).
- Memfasilitasi interaksi dan relasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi solusi serta menyusun rencana aksi kolaborasi dalam mengujicobakan inovasi baru.



PROSES



CAPAIAN DAN DAMPAK

- Sampai Juni 2018, uji coba yang dilaksanakan di Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Lombok Utara memberikan indikasi positif atas peningkatan produktivitas dan penjualan UMKM serta komitmen pemerintah daerah untuk melanjutkannya.
- Bappenas memiliki komitmen yang besar untuk memperluas proyek uji coba pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dengan pendekatan keberantaraan yang mendekatkan UMKM dengan pasarnya.

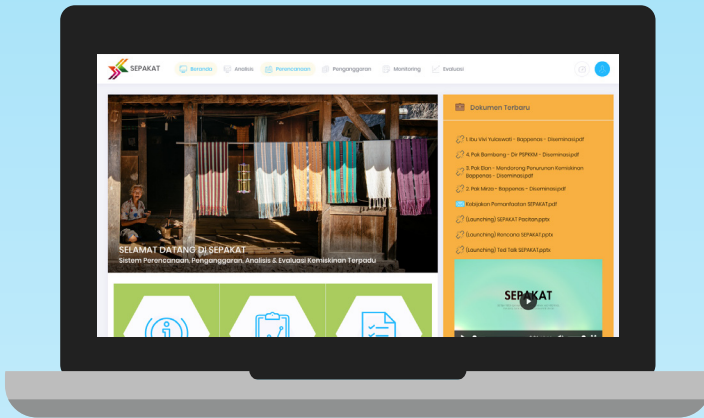
PERKEMBANGAN TERKINI

Hingga Desember 2018, delapan pemerintah daerah menyatakan minat dan komitmen bagi pengembangan ekonomi lokal dengan pendekatan keberantaraan yang bertujuan pengurangan kemiskinan.

Untuk mendukung proses keberantaraan ini, KOMPAK bersama Bappenas berencana mengembangkan suatu platform yang bertujuan menghubungkan UMKM dengan berbagai aktor yang dapat meningkatkan produktivitas serta memberikan nilai tambah kepada mereka.

SEPAKAT

Aplikasi Perencanaan Program Pengentasan Kemiskinan



SEPAKAT adalah aplikasi berbasis web untuk menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan yang berbasis bukti (*evidence-based*) sehingga program dan anggaran lebih tepat guna dan tepat sasaran.

SEPAKAT dikembangkan untuk mendiagnosis karakteristik kemiskinan di setiap wilayah berdasarkan data BPS dan data daerah. SEPAKAT juga dapat mencari alternatif solusi dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran dengan target BDT dan semua sumber pendanaan yang tersedia di daerah.

PROSES



KEUNIKAN



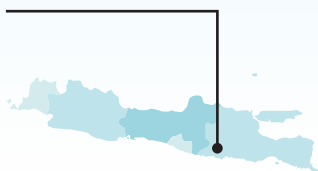
Menjadi sistem yang memanfaatkan seluruh data untuk analisis kondisi dan mencari solusi penanggulangan kemiskinan di daerah.



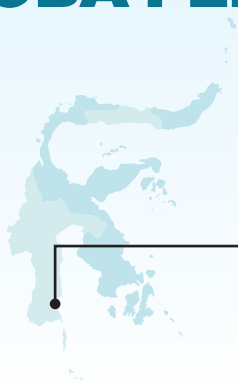
Menjadi acuan dalam prioritas target dan alokasi program penanggulangan kemiskinan.

LOKASI UJI COBA PEMANFAATAN SEPAKAT

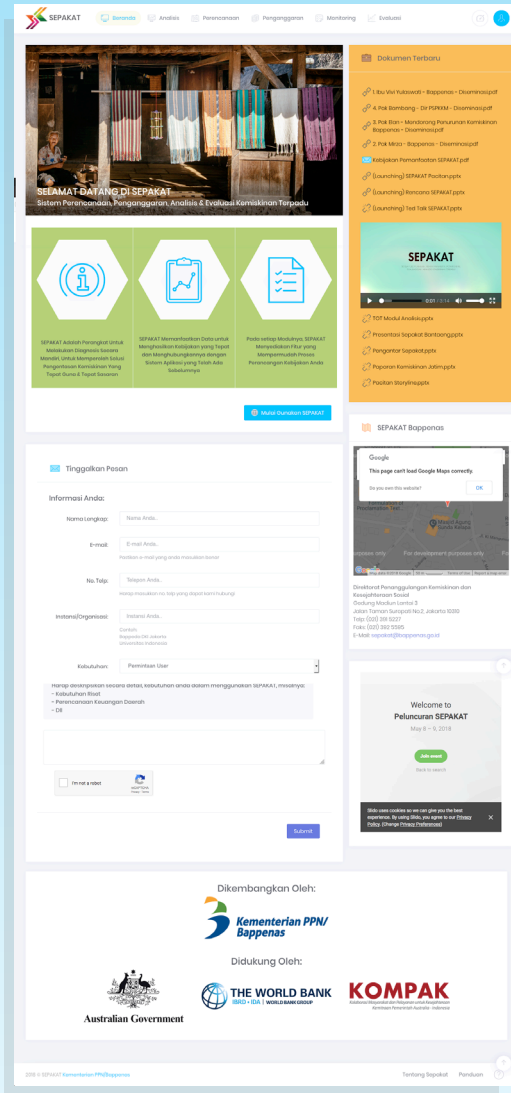
Kabupaten Pacitan,
Jawa Timur



Kabupaten Bantaeng,
Sulawesi Selatan



KELEBIHAN APLIKASI SEPAKAT



- Fitur atau tampilan menarik.
- Modul analisis kemiskinan di SEPAKAT dapat memudahkan pemerintah daerah untuk menganalisis kondisi masyarakat miskin dan rentan. Analisis tersebut teintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi.
- Mudah dioperasionalkan.
- Hasil dapat disimpan dalam sistem aplikasi.
- Hasil analisis dapat ditampilkan sesuai kebutuhan.
- Sudah dapat menampilkan skala prioritas program penanggulangan kemiskinan melalui menu Prioritisasi.
- Ada menu bantu yang menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dalam aplikasi.
- Pada proses Penganggaran, aplikasi dapat memberikan dua opsi, berdasarkan jumlah sasaran dan pagu anggaran.
- Riwayat perubahan dari proses perencanaan, penganggaran, monitoring, dan evaluasi dapat dilacak.
- Bisa memantau capaian program baik secara target kinerja maupun serapan anggaran.
- Memudahkan para pengambil kebijakan untuk menentukan prioritas program berdasarkan data dan fakta di lapangan sehingga sulit diintervensi pihak lain (DPRD).

CAPAIAN

63
kabupaten/
kota

**telah mengikuti
launching SEPAKAT**

19
provinsi

101
kabupaten/
kota

**telah melaksanakan
sosialisasi SEPAKAT**

3
provinsi

Bappeda Kabupaten Bantaeng, Bondowoso, dan Lumajang telah menggunakan aplikasi SEPAKAT untuk menyusun rancangan awal (ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

KELAS PERAHU

Upaya Menekan Angka Putus Sekolah bagi Anak-Anak Pulau di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan



Kelas Perahu memastikan akses layanan pendidikan bagi anak-anak nelayan di wilayah kepulauan, dengan memberikan kesempatan belajar mandiri melalui bimbingan khusus dan Lembar Kerja Siswa (LKS).

PROSES KELAS PERAHU

SEBELUM SISWA MELAUT

Sekolah melakukan pendataan terhadap siswa yang akan pergi melaut.



Guru menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS) sesuai dengan kelas masing-masing.



Bimbingan belajar dilaksanakan untuk memandu siswa mengerjakan LKS.



SAAT SISWA MELAUT

Siswa mengerjakan LKS.

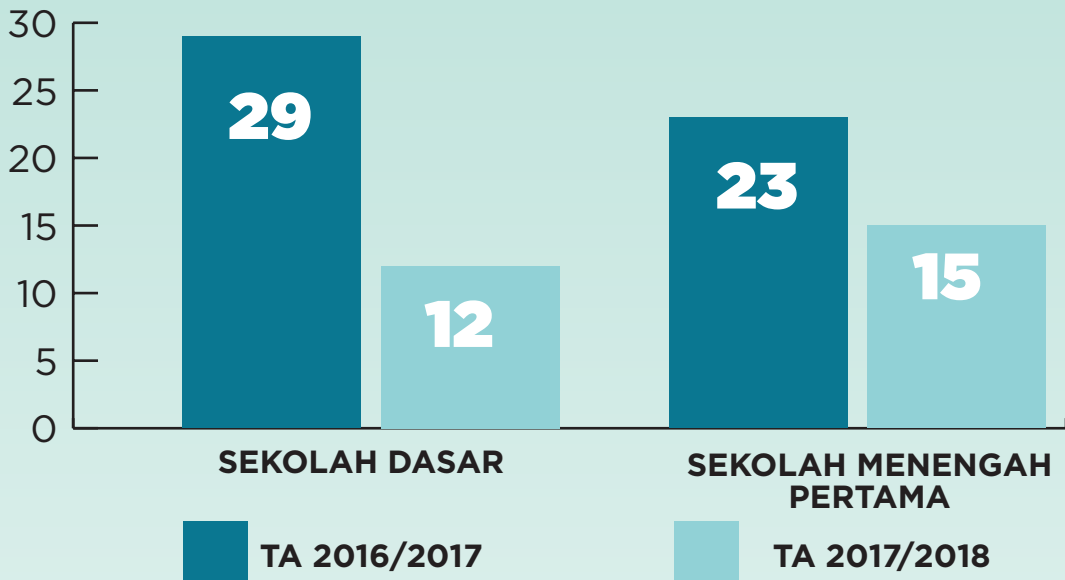


SETELAH SISWA MELAUT

Evaluasi dan penilaian terhadap hasil kerja.



DAMPAK JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH SISWA SD DAN SMP



Program Kelas Perahu yang telah berjalan sejak tahun ajaran 2016/2017 mampu menurunkan jumlah anak putus sekolah (SD dan SMP) di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara sebesar 51,9%.

PERKEMBANGAN TERKINI



Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sedang melaksanakan evaluasi untuk memperbaiki program Kelas Perahu guna direplikasi di wilayah kecamatan kepulauan lain.



Pemerintah daerah menjajaki kemungkinan integrasi program ini dengan program Desa Mandiri agar ekonomi masyarakat nelayan di wilayah kepulauan semakin baik sehingga tidak ada lagi anak-anak yang harus bekerja dan meninggalkan sekolah.

GETAR DESA

Inovasi Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

Gerakan Pendidikan Kesetaraan berbasis Desa (Getar Desa) adalah program pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di seluruh Desa (219 desa/kelurahan) di Kabupaten Bondowoso. Program ini ditujukan kepada masyarakat berusia 25-45 tahun yang tidak tamat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK melalui pembelajaran program Paket A, Paket B, serta Paket C.



KEUNIKAN

Program peningkatan angka partisipasi belajar Getar Desa merupakan inisiatif Pemkab Bondowoso dengan melibatkan kolaborasi tim teknis di tingkat kabupaten yang terdiri dari OPD terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DPMD, Diskoperindag dan UKM, Bappeda, DPKAD, Inspektorat Daerah, Kepolisian, TNI, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan partisipasi berbagai kelompok masyarakat serta lembaga profesi lain (PGRI, PKBM).



DAMPAK

Kejelasan pendanaan program melalui dana desa dan partisipasi berbagai kelompok masyarakat telah mampu membawa berbagai perubahan yang signifikan, khususnya dalam memastikan masyarakat mendapat pendidikan yang berkualitas.

45 Juta

Anggaran per desa per semester Program Getar Desa.

9,4 Miliar

Total Dana Desa tahun 2017 Program Getar Desa.

307 Juta

Total Dana APBD Bondowoso untuk Program Getar Desa.

17.930 716

Warga belajar pendidikan kesetaraan Program Getar Desa.

Jumlah Kelompok Belajar & Usaha Program Getar Desa.

4.255

Jumlah guru bersertifikasi yang terlibat sebagai tutor Program Getar Desa.

60

Jumlah PKBM yang terlibat sebagai penyelenggara Program Getar Desa.

45 Juta

Program CSR untuk Program Getar Desa.



CAPAIAN



704 warga telah melaksanakan USBM untuk Paket A dan UNBK untuk Paket B dan Paket C pada 2018.



Jumlah warga belajar di seluruh desa hingga Juni 2018 mencapai 17.930 orang yang terbagi dalam 716 kelompok.



Meningkatkan kegiatan ekonomi produktif dengan melibatkan 716 kelompok usaha yang merujuk atas 6 jenis klaster.

PUSKESMAS PENGGERAK

Motor Penggerak Perbaikan Kualitas Hidup di Papua dan Papua Barat

Puskesmas Penggerak dimotori Kepala Puskesmas yang aktif berinteraksi untuk mendorong Puskesmas lain melakukan perubahan didasarkan atas pengalaman mengelola Puskesmas secara baik dan terintegrasi dengan unit-unit layanan lain dan kampung.



KEUNIKAN

Penguatan kapasitas seperti pelatihan dan pendampingan, penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK), manajemen puskesmas, pembuatan SOP, pendampingan menuju Akreditasi Puskesmas, revitalisasi Badan Peduli Kesehatan.

Penguatan integrasi di tingkat distrik/kecamatan dan kampung.

Puskesmas yang sudah menyelesaikan berbagai hal dasar dan telah membangun integrasi bisa membantu menggerakkan Puskesmas lain melakukan perubahan.





CAPAIAN



Banyak kampung di 10 kabupaten telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) untuk mendanai pembangunan fasilitas dan biaya operasional.



Data yang terdapat pada Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) telah dihubungkan dengan data Puskesmas sebagai validasi data situasi kesehatan masyarakat.

AKREDITASI PUSKESMAS

Meningkatkan Layanan dan Fasilitas Kesehatan di Puskesmas melalui Akreditasi

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal, oleh Komisioner Akreditasi terhadap Puskesmas, apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan. Puskesmas Kassi-Kassi dan Baruga adalah salah satu Puskesmas yang telah mendapatkan akreditasi di Kecamatan Pajakung, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.



PROSES

- Membangun komitmen bersama dengan seluruh staf Puskesmas.
- Membangun pola pikir staf Puskesmas untuk melakukan secara bertahap dan teliti.
- Melakukan pembenahan Puskesmas, baik secara fisik maupun secara administrasi.
- Melakukan pelatihan pembuatan dokumen dan penyusunan visi, misi, moto, serta tata nilai secara partisipatif.
- Melakukan pelatihan pelayanan prima.
- Pendampingan dan penyusunan dokumen administrasi.



DAMPAK



Puskesmas lebih aman dan nyaman



Puskesmas memberikan pelayanan yang sesuai standar



Puskesmas sudah ada manajemen keselamatan pasien



Kondisi ruangan rawat inap lebih aman dan nyaman



Meningkatnya kepercayaan masyarakat, jumlah pengunjung naik dari 18.824 menjadi 22.054 orang



Keluarga pasien ikut senang dengan perubahan sarana dan prasarana pelayanan



Sistem pelayanan 24 jam berjalan mulai dari loket, UGD, rawat inap, dan apotek



Puskesmas Kassi-Kassi menjadi destinasi pembelajaran dari instansi terkait

TARGET



13 Puskesmas terakreditasi pada 2018

2 Puskesmas akan dilakukan reakreditasi pada 2019



PROSES REPLIKASI



- Pelatihan kepada 13 Puskesmas lain di Kabupaten Bantaeng untuk persiapan reakreditasi.
- Meningkatkan kapasitas kepada seluruh staf Puskesmas untuk selalu memberi pelayanan prima.
- Pelatihan manajemen Puskesmas.
- Pelatihan pemahaman dokumen akreditasi.
- Pelatihan pengenalan praktik baik.
- Pelatihan penyusunan perencanaan berbasis kebutuhan.
- Pelatihan pengelolaan pengaduan sebagai basis perbaikan pelayanan.

KOMPAK

*Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan
Kemitraan Pemerintah Australia - Indonesia*